

etika komunikasi

Manipulasi Media,
Kekerasan, dan
Pornografi

Dr. Haryatmoko



PENERBIT PT KANISIUS

Daftar Isi

PENDAHULUAN	9
BAB I MENGAPA PERLU ETIKA KOMUNIKASI?	19
1.1. Informasi sebagai Komoditi dan Mimetisme	20
1.2. Media Mengubah Integrasi Sosial, Reproduksi Budaya, dan Partisipasi Politik	25
1.3. Dilema Media Massa	30
1.4. Pentingnya Pencitraan	32
1.5. Tiada Perlawanan Terorganisir dan Bentuk Baru Sensor	34
1.6. Tiga Syarat Kemungkinan Etika Komunikasi	38

BAB II DIMENSI-DIMENSI ETIKA KOMUNIKASI	43
2.1. Tiga Dimensi Etika Komunikasi	45
2.2. Penguatan Deontologi Jurnalisme dan Batas Kebebasan Pers	51
2.3. Perluasan Prosedur Regulasi dan Pembentukan Komisi	54
2.4. Determinasi Ekonomi dalam Etika Komunikasi	56
2.4.1. Budaya Baru: Organisasi Luwes dan Iklim Persaingan	58
2.4.2. Emosi Sosial dan Peran Serikat Pekerja	61
2.4.3. Seringnya Reorganisasi Institusi	63
2.4.4. Konsultan, Legitimasi, dan Rasionalitas Sosial	64
BAB III MEDIA, PELAYANAN PUBLIK, DAN LOGIKA POLITIK	69
3.1. Manipulasi dan Demagogi dalam Politik	69
3.2. Menjamurnya Sarana Komunikasi	71
3.3. Prinsip Pelayanan Publik	73
3.4. Mengimbangi Kelemahan Prosedural dengan Memperbaiki Komunikasi	77
3.5. Melemahnya Daya Tarik Komunikasi Politik	78
3.6. Persaingan dalam Mempengaruhi Persepsi Masyarakat	81

3.7. Jurnalisme Populis Mengisi Kekosongan Ideologi?	83
3.8. Etika Komunikasi Di Dalam Situasi Konflik	85
BAB IV ETIKA KOMUNIKASI DAN MASALAH PORNOGRAFI	93
4.1. Argumen Penolakan Pornografi dan Etika Minimal	94
4.2. Hukum Represif, Perempuan Menjadi Korban	95
4.3. Pornografi dan Erotisme	97
4.4. Paternalisme Negara = Polisi Moral	102
4.5. Legalisme versus Toleransi	105
4.6. Negara Mengontrol Semua dan Bahaya Diskriminasi Hukum	107
4.7. Analogi Ekonomi dan Etika	112
4.8. Etika Komunikasi dan Multikulturalisme	114
BAB V MENGHADAPI KEKERASAN DALAM MEDIA	119
5.1. Aspek Estetik Kekerasan	121
5.2. Bahaya Kekerasan dalam Media	124
5.3. Menentukan Batas-Batas Kekerasan	126
5.4. Kekerasan-Dokumen	128
5.5. Kekerasan-Fiksi dan Kekerasan-Simulasi	132
5.6. Kekerasan Simbolik dan Ketidakpedulian	135
5.7. Etika Komunikasi dan Politik Media	141

BAB VI DILEMA REGULASI PUBLIK KEBEBASAN	
BEREKSPRESI DAN TANGGUNG JAWAB	145
6.1. Alasan Regulasi Publik: Ketika Informasi selalu Interpretasi	147
6.2. Regulasi Publik dan Pluralisme: Memperkuat Deontologi rofesi	149
6.3. Berbagai Macam Regulasi Publik	152
6.4. Regulasi Prosedural	155
6.5. Dalam Persimpangan Etika: Deontologi, Teleologi, dan Komunitarian	160
DAFTAR PUSTAKA	171
INDEKS	177